

**IMPLEMENTASI PERANAN BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN PEMBANGUNAN**

**Executive Summary**



Disusun Oleh:

**Muhammad Diva Agredi**  
**1710012111142**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**Registrasi : Regno: 18/Skripsi/HTN/FH/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

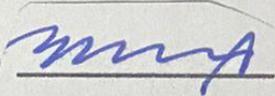
**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/II-2022**

Nama : **Muhammad Diva Agredi**  
NPM : **1710012111142**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Peranan BPKP Perwakilan Sumatera Barat Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan**

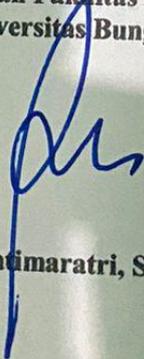
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

**Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** (Pembimbing I)



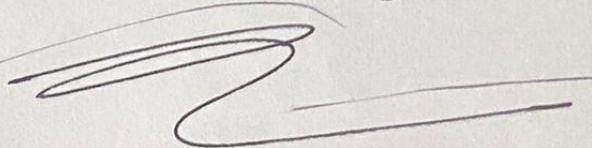
**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Dr. Desmal Fajri, S.H., M.H)**

**IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF BPKP REPRESENTATIVE OF WEST SUMATRA IN CONTROLLING REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION BASED ON THE PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 192 OF 2014 CONCERNING DEVELOPMENT FINANCIAL SUPERVISION AGENCY**

Muhammad Diva Agredi<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>  
Legal Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta  
Padang  
Email: [divaagredi06@gmail.com](mailto:divaagredi06@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Presidential Decree No. 192 of 2014 Article 2 "BPKP has the task of carrying out government affairs in the field of state/regional financial supervision and national development. BPKP itself is one of the government's internal supervisory agencies that plays an important role in supervision. Problem Formulation 1) What are the procedures carried out by BPKP in supervising regional finances in West Sumatra? 2) Obstacles faced by BPKP in supervising regional financial management in West Sumatra. The type of research is sociological juridical. using primary legal material data sources, secondary legal materials, data collected through document studies. Based on research 1) BPKP acts as the government's internal auditor with the task of utilizing the work of ITJEN, BAWASDA of other Government Supervision Apparatuses. and BPKP plays a particular role in disclosing misappropriation of funds managed by the government after an internal audit and indications of misuse of funds then processing findings and recommendations and monitoring the follow-up implementation. 2) Obstacles faced in the implementation of development and supervision of state finances and development, there are still limited professional personnel in the government and development system, both at the center and in the regions who have technical and managerial capabilities, both regarding policies and related laws and regulations, environmental conditions and its substance. projects, especially in the context of implementing development programs and projects and equipped with information technology knowledge to facilitate the management of monitoring data.*

**Keywords:** *BPKP, Regional Finance, Supervision*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan kapasitasnya sebagai badan administratif yang cukup cakap kepada presiden, BPKP tentu memiliki situasi di otoritas publik. Sehingga cenderung terlihat siapa yang sadar dan kepada siapa mengatur dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya, sehingga berjalan secara kuantitatif dan berjalan sesuai pedoman materiil. Situasi BPKP sebagai pengelola atau juga disebut sebagai penilai interior otoritas publik menjalankan kewajibannya dengan menganalisis laporan kerugian negara, dimana laporan yang dibuat oleh BPKP adalah laporan yang diperiksa yang kemudian diberikan kepada klien data ringkasan fiskal, khususnya presiden..

Dari hasil laporan yang dikeluarkan oleh BPKP, jelas ada usulan yang diberikan kepada pimpinan tertinggi untuk penyempurnaan di masa mendatang, agar nasabah data kerugian negara dapat menentukan pilihan yang tepat. Dapat dikatakan bahwa fungsi BPKP ini sangat rentan terhadap pengawasan keuangan, lembaga tersebut sangat bertanggungjawab didalam melakukan pengawasan keuangan Negara ataupun daerah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam proposal penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERANAN BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192**

## **TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN"**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan BPKP dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa prosedur yang dilakukan oleh BPKP dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan

### **2. Sifat Penelitian**

Pada dasarnya penelitian bertujuan agar bisa menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sifat dari penelitian ini bersifat berdasarkan sudut bentuknya.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) PERPRES No. 192 Tahun 2014 Tentang

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah
  - b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, hukum
3. Teknik Pengumpulan Data  
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*.<sup>1</sup>
  4. Analisa Data  
Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diurai dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Yang Dilakukan BPKP Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Daerah Di Sumatera Barat

Dengan kemampuannya, BPKP mengambil bagian yang unik dalam mengungkap adanya penyelewengan dana yang di kelola oleh pemerintah setelah adanya audit internal dan indikasi adanya penyalahgunaan dana.

Adapun langkah yang dilakukan yaitu:<sup>2</sup>

1. BPKP bertindak sebagai interen auditor pemerintah dalam badan publik dengan penugasan mamfaatkan hasil kerja ITJEN, BAWASDA dari Badan Pengawasan Pemerintahan lainnya. Kemudian, mangolah temuan dan rekomendasi dan menyaring tindakan selanjutnya.
2. BPKP sebagai analisa kebijakan dengan menggunakan hasil pemeriksaan pejabat pengawasan lainnya sebagai bahan uji strategi publik. Kemudian, kemudian memberikan usulan untuk penyempurnaan kabijakan publik.
3. Sebagai lembaga ivastigasi, lebih tepatnya menjadi pendukung utama BPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam upaya pamberantasan korupsi.

Peran BPKP terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai badan Pengawasan sudah pasti BPKP mempunyai peran dalam sistim pengendalian

intern pemerintah. BPKP melekukan pengawasan terhadap tanggungjawab dana negara untuk kegiatan tertentu yang meliputi:

- 1) Kegiatan yang bersifat lintas sektor
- 2) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara.
- 3) Kegiatan yang berbeda tergantung pada tugas resmi Arahan SPIP yang dilakukan oleh BPKP antara lain:
  - a) Perencanaan aturan untuk Pelaksanaan SPIP
  - b) Sosialisasi SPIP
  - c) Pekegiatan dan Pendidikan SPIP
  - d) Bimbingan dan konsultasi SPIP
  - e) kompetensi auditor aparat pengawas intern pemerintah yang wajib di tingkatkan

#### B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh BPKP Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sumatera Barat

Kendala dalam pengawasan sering terjadi dikalangan organisasi, dimana suatu sistem pengawasan pada umumnya terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Salah satunya dalam pengawasan keuangan daerah, pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi aktual untuk di kemukakan yang menjadi konflik dalam aturan main dalam pengawasan yang dilakukan. hambatan atau kendala cenderung bersifat

Kendala BPKP menurut Bapak Agus Prasetyo Dinamika dari dibentuknya BPKP hingga sekarang masih berkendala dengan dimiliki oleh BPKP yaitu:<sup>3</sup>

1. Sumber Daya Manusia.
2. Anggaran.
3. Metode kerja dalam pengawasan
4. Presepsi negative atas pengawasan

Bapak Agus Prasetyo juga menjelaskan penyebab yang terjadi dari kendala BPKP adalah SDM bahwa SDM yang jelas bisa mengawasi pengelolaan keuangan daerah berasal dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN), dibandingkan dengan formasi sekarang SDM yang diberikan oleh BPKP sangat kurang dibandingkan dengan pelaksanaan yang akan dijalankan. Kebijakan pemerintah dalam SDM pun untuk dikerjakan sangat minim karna kurangnya pengetahuan untuk menjalankan kebijakan yang dibuat oleh presiden

### IV. PENUTUP

#### A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 53.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Koordinator Pengawsan Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (Korwas Bidang P3A), Hari Salasa 27 July 2021. Pukul 13.30.WIB

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Koordinator Pengawsan Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (Korwas Bidang P3A), Hari Salasa 27 July 2021. Pukul 13.30.WIB

1. BPKP bertindak sebagai auditor internal pemerintah dengan tugas memanfaatkan hasil pekerjaan ITJEN, BAWASDA Aparatur Pengawasan Pemerintah lainnya dan BPKP berperan khususnya dalam pengungkapan adanya penyelewengan dana yang di kelola oleh pemerintah setelah adanya audit internal dan indikasi adanya penyalahgunaan dana kemudian mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan keuangan negara serta pembangunan, masih terbatasnya tenaga profesional dalam sistem pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, baik mengenai kebijakan maupun peraturan perundang-undangan terkait, kondisi lingkungan serta substansinya. proyek, terutama dalam rangka pelaksanaan program dan proyek pembangunan dan dilengkapi dengan pengetahuan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan data pemantauan

#### B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan peran BPK sebagai garda terdepan pemberantasan

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU-BUKU

Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor

##### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

##### C. SUMBER LAIN

<http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak

tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis alam rangka meningkatkan peran BPKP sebagai pengawasan keuangan negara dan pemerintahan daerah dan pusat.

2. Perlu adanya tambahan SDM dan Anggaran yang dilakukan BPKP dalam Audit yang dilakukan, karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh BPKP sebagai Auditor seharusnya BPKP menambah SDM tersebut, jika dilihat adanya beberapa daerah yang tidak di audit langsung oleh BPKP dan hanya menerima laporan dari Dirjen kata/kabupaten dikarenakan kurangnya SDM dan Anggaran yang dimiliki.
3. Agar Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan transparansi hasil pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan penghambat yang dihadapi oleh BPKP dalam melakukan pemeriksaan, BPKP dapat mengatasi minimnya jumlah pemeriksa dengan memilih dan merekrut tenaga pemeriksa dengan kualifikasi yang sesuai didasarkan atas tingkat kebutuhan dari proses pemeriksaan.

terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Kepada kedua orang tuaku untuk papa tercinta Mukhlis. yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku, Mamaku tersayang Melati, Tak akan pernah ada rasa cukup untuk membalas doamu, kasih sayangmu, perhatianmu, Kepada Kakak ku Mutiara Melisa, Abangku Eko Kurniawan atas support, doa, usaha, dan nasehatnya kepada penulis.

Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya